PEMKAB SUMEDANG BERTEKAD RAIH NILAI MAKSIMAL KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 20 April 2022 - Nurul Imam Perkasa

GALAMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang bertekad untuk meraih hasil maksimal dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada unit-unit layanan terkait Nilai Standar Pelayanan.

Hal itu diungkapkan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana saat diterima langsung di Ruang Tengah Gedung Negara, Selasa 19 April 2022.

Bupati pun menekankan harus adanya sosialisasi secara menyeluruh sehingga akan muncul kesadaran unit-unit kerja untuk pelayanan lebih baik lagi dan nilai kepatuhan pun akan meningkat.

Untuk menuju ke arah itu, Dony mengharapkan adanya partisipasi masyarakat, untuk turut mengevaluasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai masukan positif.

"Tentunya standar pelayanan pemerintah ini dapat diketahui oleh masyarakat sehingga bisa ikut mengawasi, menilai dan memberi masukan demi perbaikan ke depan," ujarnya.

Selaras dengan Visi Sumedang yang ke-4 yakni Profesional Aparaturnya, maka pelayanan di Kabupaten Sumedang harus lebih baik dan berkualitas dengan 'goal-,,nya" rakyat dapat terlayani dengan baik.

Sebut Bupati, Kabupaten Sumedang mendapat penghargaan kategori pelayanan publik dengan predikat Pelayanan Prima dari Kemenpan RB sebagai modal untuk meraih Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang lebih baik.

Dikesempatan itu, dia jminta Bagian Organisasi, DPMPTSP dan dinas terkait lainnya, untuk membentuk tim khusus terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, sehingga masyarakat pun dapat terlayani dengan baik.

" Saya juga berharap pihak Ombudsman RI dapat membimbing Pemda Kabupaten Sumedang untuk dapat meraih hasil masksimal. Yakni, dengan memberi bimbingan dan pendampingan khusus, agar pelayanan publik Sumedang menjadi sistematis dan terbaik di Indonesia," katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriayana mengatakan, meski Sumedang sudah memiliki modal dalam reformasi birokrasi internal terkait pengelolaan kompetensi pelayanan bagi aparatur pemerintahan, namun harus tetap memperibaiki pelayanan publiknya.

"Tahun ini Sumedang meningkat mendapatkan point 76 atau masuk Zona Kuning. Namun masih kurang 4 poin agar masuk ke Zona Hijau," ungkapnya.

Menurutnya ada beberapa variabel yang mejadi sasaran pelayanan publik. Antara lain terkait dengan sarana prasarana,

administrasi pengelolaan pengaduan, tersedianya fasilitas untuk disabilitas dan standar layanan yang harus diketahui masyarakat.

"Dengan mengetahui standar pelayanan, masyarakat bisa mengawasi pelayanan publik di Kabupaten Sumedang sehingga dapat melakukan perbaikan," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap ada kunjungan langsung ke instansi yang kurang dalam pelayanannya sehingga ada perbaikan dan mengecek langsung layanan pengaduan.